



Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama	: ANDRI YULIKA
NIK	: 1371102610720004
Lembaga	: PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Unit Kerja	: SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Kerja	: ASISTEN
Jabatan	: ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
Jenis Laporan	: Periodik - 2024
Tanggal Kirim	: 16 Januari 2025

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ANDRI YULIKA**
2. Jabatan : **ASISTEN ADMINISTRASI UMUM**
3. NHK : **146230**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.400.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 147 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000		
2. Tanah Seluas 169 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
3. Tanah Seluas 169 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 147 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	309.000.000
1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000		
2. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000		
3. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000		
4. MOBIL, TOYOTA VELOZ MINIBUS Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	208.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	115.370.411



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.032.870.411
III. HUTANG	Rp.	140.992.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.891.878.411

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : RINI OCTAVIANTI
NIK : 1371075910800005
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Unit Kerja : INSPEKTORAT DAERAH
Sub Unit Kerja : INSPEKTORAT DAERAH
Jabatan : SEKRETARIS
Jenis Laporan : Periodik - 2024
Tanggal Kirim : 28 Januari 2025

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RINI OCTAVIANI
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 429266

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.180.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000		
2. Tanah Seluas 385 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , WARISAN Rp. 190.000.000		
3. Tanah Seluas 833 m2 di KAB / KOTA TANAH DATAR, WARISAN Rp. 465.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 210 m2/125 m2 di KAB / KOTA TANAH DATAR, WARISAN Rp. 175.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	485.000.000
1. MOBIL, TOYOTA SEDAN/SD Tahun 1974, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000		
2. MOBIL, HONDA MOBILIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000		
3. MOBIL, HONDA HRV 1.5 L SE CVT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	30.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	482.000.000
Sub Total	Rp.	2.177.000.000



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.177.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.